

## Artikel Sastra/ Khazanah Pikiran Rakyat

### CERPEN POLITIK: ASPIRASI ATAU PROPAGANDA?

Oleh Nenden Lilis A.

**BERBICARA** mengenai sastra dan politik selalu tak lepas dari kaitan-kaitan antara karya sastra, sastrawan, masyarakat, dan negara (pemerintah) beserta kebijakan-kebijakan dan ideologi-ideologi yang dianutnya. Hubungan antara keempat unsur itu sudah diperdebatkan dan diperbincangkan sejak lama (sejak zaman Plato) dan kerap menimbulkan peristiwa-peristiwa tidak mengesankan. Peristiwa-peristiwa itu contohnya berupa pengusiran atau penjegalan sastrawan dan karyanya dari negara atau masyarakatnya karena karyanya dianggap membahayakan nilai-nilai atau ideologi (kebijakan) pemerintah dan masyarakatnya.

Terdapat daftar yang sangat panjang dari peristiwa ini: Boris Pasternak, Solzhenitsyn, Anna Akhmatova di Rusia, Celine, Victor Hugo di Prancis, Wole Soyinka di Nigeria, Taslima Nasrin di Bangladesh, Pramoedya Ananta Toer, Rendra, Mochtar Lubis, Emha Ainun Nadjib di Indonesia, dan masih banyak lagi. Namun, hubungan antara sastra dan politik juga tak jarang menimbulkan *patronage* dari pemerintah terhadap sastrawan yang mau menjadi pendukung dan alat penyebar kebijakan politik pemerintah.

Hubungan antara sastra dan politik di Indonesia sendiri, sudah terjadi sejak zaman lampau, sejak zaman ketika para pujangga (sastrawan) mendapat pengayoman para penguasa (raja). Hal itu terus berlanjut ke masa pemerintahan kolonial (Belanda). Hal ini misalnya ditandai dengan munculnya karya-karya sastra pada tahun 1922 dan 1924, yakni yang ditulis Mas Marco Kartodikromo dan Semaun, yang menyuarakan dan menyebarkan komunisme. Sementara itu, pemerintah kolonial sendiri mendirikan Balai Pustaka yang menjadi alat penyebar ideologi dan kebijakan pemerintah jajahan dalam penerbitan karya-karya sastra, sekaligus alat pengontrol dan pencegah bacaan-bacaan yang tidak sesuai/membahayakan kebijakan mereka.

Di zaman Jepang, para sastrawan diraih untuk menyebarkan gagasan kebangkitan Asia Raya demi kemenangan Jepang. Salah seorang yang terperangkap dalam propaganda Jepang ini contohnya adalah Nur Sutan Iskandar.

Masuk ke Masa Kemerdekaan, terutama pada zaman Orde (sekitar 1960-an), hubungan antara sastra dan politik ditandai dengan pertarungan antara kelompok Lekra yang berpaham kiri dan mendapat pengayoman penguasa (Soekarno) dengan kelompok Manifes Kebudayaan yang tidak menghendaki sastra dijadikan alat propaganda politik kelompok tertentu.

Pada Zaman Orde Baru, yang terjadi berlainan dengan zaman-zaman sebelumnya, sastra dan sastrawan cenderung berhadap-hadapan dengan penguasa. Represivitas penguasa di berbagai bidang menyebabkan melimpahnya karya-karya sastra yang didominasi kritik-kritik seputar sosial-politik yang sedang aktual pada waktu itu yang melakukan resistensi terhadap penguasa. Pada masa ini para sastrawan mendapat pengawasan ketat dari penguasa, dan yang dianggap membahayakan tak segan-segan dicekal.

### Cerpen Politik

Apa yang diuraikan di atas adalah beberapa gambaran kaitan sastra dan politik. Gambaran tersebut akan menjadi lebih luas dan lebih panjang lagi apabila pengertian

politik itu sendiri tidak kita batasi. Oleh karena itu, tulisan ini hanya akan melihat politik dalam apa yang seperti digambarkan di atas, yakni yang mengacu pada pengertian politik sebagai segala urusan, tindakan (kebijakan, siasat, dsb.) mengenai pemerintahan negara (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*) atau politik sebagai tindakan atau kegiatan yang dipergunakan untuk mendapat kekuasaan dalam negara, masyarakat, atau lembaga (Sapardi Djoko Damono).

Segala kebijakan dan tindakan tsb. selalu tak lepas dari ideologi tertentu yang menjadi dasar/acuan tindakannya. Tindakan-tindakan dan kebijakan-kebijakan itu pun menimbulkan akibat-akibat tertentu di masyarakat. Oleh karena itu, pembicaraan mengenai politik dalam hubungannya dengan sastra (dalam hal ini cerpen sebagai fokus pembicaraan tulisan ini), tak akan lepas dari pembicaraan mengenai urusan-urusan, tindakan-tindakan, siasat, kebijakan, ideologi dan kegiatan-kegiatan yang dipergunakan untuk mendapat kekuasaan dalam negara, masyarakat, atau lembaga tertentu, serta kondisi-kondisi masyarakat yang ditimbulkannya yang terdapat/tergambar dalam cerpen dan yang direspon di dalam cerpen (baik berupa dukungan, maupun kritikan, gugatan, dan perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan itu dan terhadap kondisi-kondisi yang diakibatkannya).

### **Aspirasi atau Propaganda?**

Banyak sudah cerpen di berbagai belahan dunia ini yang berkaitan dengan politik, baik yang menggambarkan kondisi masyarakat yang diakibatkan kebijakan politik tertentu, yang mendukung dan menyebarluaskan paham politik tertentu, maupun yang mengkritik/melawan suatu kebijakan politik.

Cerpen-cerpen yang mendukung dan menyebarluaskan paham politik contohnya bisa dilihat pada cerpen-cerpen karya Maxim Gorki, Lu Hsun, John Steinbeck, Pramoedya Ananta Toer yang secara sadar dibuat untuk mendukung dan menyebarluaskan Marxisme dengan mengacu pada prinsip realisme sosialis yang dicetuskan Gorki. Pada cerpen-cerpen mereka, pengarangnya secara sadar menjadikan cerpen sebagai alat perjuangan kelas yang berpihak pada kaum proletar/buruh/kerakyatan yang diasingkan dan ditindas sistem kapitalis.

Sementara karya-karya, antara lain Anton Chekov dan Solzhenitsyn melakukan kritik terhadap pemerintahan Sovyet dan elite partai yang dengan paham di atas telah menjadi penindas baru kaum buruh. Kritik dan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah dengan kondisi masyarakat yang ditimbulkan sebagai akibat kebijakan itu juga muncul dalam cerpen-cerpen karya pengarang Indonesia, terutama pada akhir masa orde lama (dapat dilihat pada cerpen-cerpen Angkatan 66) dan semasa Orde Baru. Hal itu misalnya dapat kita lihat pada cerpen-cerpen Seno Gumira Ajidarma, Ahmad Tohari, Joni Aradinata, Agus Noor, Ratna Indraswari Ibrahim, Lea Pamungkas, dll. Bahkan, pada cerpen-cerpen Helvy Tiana Rosa, kritik itu tidak hanya diarahkan pada kebijakan pemerintah dalam negeri, tapi juga kebijakan politik internasional, terutama yang berkaitan dengan penindasan-penindasan terhadap kaum Islam. Di belahan dunia lainnya, misalnya Mesir, Nawal el-Saadawi melakukan kritik keras terhadap kediktatoran pemerintahan Anwar Sadat.

Tatkala kita berbicara hubungan cerpen (sastra) dengan politik seperti di atas selalu timbul masalah yang tarik-menarik antara prinsip-prinsip estetika sastra dan kepentingan politik itu sendiri, apalagi terhadap sastra yang berpihak pada pengayom atau paham politik golongan/negara tertentu. Dalam hal ini selalu timbul pertanyaan

seputar aspirasi dan propaganda yang cenderung dominan disuarakan cerpen-cerpen politik.

Sebetulnya, tanpa dihubungkan dengan politik pun, saya melihat pada umumnya karya sastra selalu menyuarakan - atau paling tidak- mengandung aspirasi dan propaganda. Itu jika kita melihat aspirasi sebagai harapan dan tujuan untuk suatu perbaikan dan keberhasilan di masa yad, dan propaganda sebagai suatu penerangan (paham, pendapat, dsb.) yang dikembangkan dengan tujuan meyakinkan orang agar menganut atau mendukung sikap dan pandangan tertentu (lihat *Kamus Besar Bahasa Indonesia*).

Pengarang, seperti juga anggota masyarakat lainnya, memiliki visi-misi-aspirasi dalam kehidupannya. Visi-misi-aspirasi ini eksplisit/implisit akan tercermin dalam karyanya, dan visi-misi-aspirasi itu dikemukakan dalam karyanya tiada lain untuk mengajak pembacanya mengikuti/mendukung visi-misi-aspirasi tsb. Sebagai contoh, tatkala seorang Ahmad Tohari menggambarkan keprihatinan terhadap nasib *wong cilik* dalam karya-karyanya, ia secara tidak langsung punya harapan/aspirasi akan perbaikan nasib kaum tersebut dengan cara mengajak pembaca ikut memiliki keprihatinan yang sama terhadap mereka yang selanjutnya dapat memikirkan dan memperlakukan mereka pada nasib yang lebih baik.

Yang menjadi persoalan sebenarnya bukan pada aspirasi atau propaganda dalam cerpen politik, namun pada persoalan cara menuangkan aspirasi atau propaganda itu dalam karya, serta bagaimana seharusnya isi karya sastra; bagaimana dengan karya sastra yang sekedar dijadikan alat menyebarkan suatu paham politik dan melakukan pemihakan?

Pada dasarnya, sastra –meminjam istilah Goenawan Mohamad- mengandung pengabdian/peran yang tak cuma untuk dirinya sendiri di tengah dunia yang penuh masalah. Ia tak bisa mengabaikan realitas dengan hanya mengotak-atik hal-hal teknis dan formal dan hanya mementingkan estetika bentuk seperti dikehendaki paham seni untuk seni. Namun, ia juga tak bisa kehilangan kebebasan dan kemerdekaannya dengan hanya mengabdikan pada pengayom atau kepentingan politik tertentu karena akan hilang kejembaran pandangan dan wawasan dan sifat keuniversalannya, dan jatuh menjadi sesuatu yang sempit dan picik atau jatuh menjadi sekedar dogma dan jargon. Ia pun tak sekedar mementingkan isi karena akan kehilangan hakikatnya, dan ia seharusnya tidak sekedar menonjolkan aspirasi karena hanya akan berhenti sebagai aspirasi.

Cerpen (karena merupakan salah satu bentuk sastra), seperti tugas-tugas sastra lainnya, seperti pernah dinyatakan Budi Darma, adalah membentuk jiwa humanitat, yakni manusia yang halus, manusiawi, dan berbudaya. Hal ini akan terjadi apabila dicapai sopistikasi estetika bentuk dan isi. Inilah yang membedakan sastra dengan jenis-jenis tulisan lainnya. Yang dicari pembaca dari sastra adalah karena penuangannya yang berbeda dari jenis-jenis tulisan lainnya karena kalau isi/aspirasi saja bisa dicari pembaca dalam bentuk/ jenis tulisan lain di luar sastra.

Ini tidak berarti sastra membatasi aspirasi sebab pada kodratnya sastra memiliki peran, dalam istilah Mathew Arnold, sebagai *criticism of life* (kritik kehidupan). Ia menjadi pengontrol dari berbagai kecenderungan negatif dalam kehidupan. Ia selalu berpihak pada kemanusiaan dalam artinya yang luas dan dalam, dan selalu ingin memperbaikinya. Aspirasi dengan demikian, hendaknya muncul dengan menampakkan wawasan luas, sikap jembar, dan pandangan ke depan.

Dalam kaitan ini kita tampaknya perlu bersetuju dengan apa yang pernah diungkapkan Budi Darma bahwa agar hal itu bisa tercipta, pengarang harus mampu

menjaga jarak antara sastra di satu pihak dan emosi serta aspirasi di pihak lain, baik sebagai individu, maupun sebagai wakil dari kesadaran kolektif agar sastranya terbebas dari pencemaran emosi. Dengan demikian, estetika tetap terjaga.

Sejarah membuktikan karya-karya yang seperti inilah yang menjadi abadi dan tak habis-habis dan bosannya dikenang, serta menjadi universal di segala zaman, segala masyarakat, dan segala tempat. Aspirasi tidak verbal, langsung, dan satu sisi sehingga karya itu –meminjam ungkapan Agus Noor- menjadi dunia cerita yang meluahkan kekayaan makna, yang membuat kita tak bosan-bosan menafsir dan merebut makna darinya.

Karya-karya cerpen yang telah disinggung di depan, sekalipun berisi aspirasi politik, seperti cerpen-cerpen Gabriel Garcia Marquez, Anton Chekov, merupakan karya-karya universal karena pengarang tidak hanya berhenti pada aspirasi politik secara harafiah, mereka menggali esensi dari aspirasi itu dan menuangkannya dalam karya yang benar-benar mempertimbangkan estetika.

Pada cerpen-cerpen Maxim Gorki, sekalipun secara isi ia tak menjaga jarak dari aspirasinya sehingga karyanya terasa melankolik, karena terjadi pengolahan estetika, terutama dalam pengungkapan bahasanya, menjadi karya yang tetap dikenang hingga sekarang.

Adapun pada Pramoedya Ananta Toer, di tengah cerpen-cerpennya yang mengandung nilai-nilai universal, pada beberapa cerpennya kadang-kadang kita temui sikap menggebu-gebu menonjolkan aspirasi politiknya sehingga tendensi politik itu sangat terasa. Hal itu misalnya bisa dilihat dalam cerpennya “Sunat” dan “Makhluk di Belakang Rumah”. Tokoh-tokoh, alur, bahasa tampak menjadi sekedar kendaraan menyuarakan gagasan dan aspirasi pengarang. Dalam cerpen “Sunat” misalnya, aspirasi Pramoedya sebagai yang berhaluan kiri sangat terasa ketika ia menampilkan tokoh-tokoh pemuka agama Islam dengan pandangan yang agak menegasi, seperti penggambaran tokoh haji yang gila kawin dan kyai yang tak pernah gosok gigi.

Dalam cerpen “Makhluk di Belakang Rumah”, pengarang menciptakan tokoh-tokoh kaum buruh (babu) yang amat menderita di bawah penindasan majikannya hingga si babu mati dengan kematian yang tragis akibat penderitaan itu. Penderitaan ini pun dibumbui pula dengan komentar-komentar pengarang. Cerpen menjadi terkesan emosional dan kurang memberi makna yang lebih luas.

Pada cerpen-cerpen masa Orba, aspirasi sosial-politik sangat kental dan dominan. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang memprioritaskan pembangunan yang sifatnya materil dengan mengabaikan pembangunan spirituil, terjadinya represivitas, dan kesenjangan penguasa dengan rakyat, banyak diangkat dan dikritik dalam cerpen. Tak jarang, di dalam banyak cerpen, karena didorong tendensi sosial yang sangat tinggi, yang terasa adalah risalah-risalah sosial yang permukaan, tanpa pendalaman estetika. Hal ini menyebabkan karya yang dihasilkannya bersifat temporal/sementara. Konteks menjadi berpengaruh besar dalam hal ini. Cerpen-cerpen tsb. terasa sangat kuat pada saat konteks sosial yang diacunya masih berlangsung dan aktual. Tatkala saat yang diacunya berlalu, kekuatannya seolah melemah. Cerpen “Kematian Paman Gober” Seno Gumira Ajidarma misalnya, terasa kuat ketika Soeharto masih berkuasa. Ketika Soeharto tumbang dan karya itu kita temukan lagi dalam bukunya yang terbit pada masa reformasi, kekuatan yang kita rasakan sebelumnya tidak terasa lagi.

Masa sekarang, cerpen kita dari segi bentuk dan isi lebih terasa beragam. Cerpen-cerpen politik pun masih bermunculan. Dengan kondisi yang lebih terbuka,

bagaimana aspirasi dituangkan dalam cerpen-cerpen tsb. dan sejauh mana kekuatannya, tentunya masih kita tunggu.\*\*\*

*(Penulis adalah cerpenis dan pengajar di Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra  
Indonesia Universitas Pendidikan Indonesia)*